

RINGKASAN

Tiara Dwihanasetya. Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman. Optimalisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H. M.Hum dan Anggota Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

Tindak pidana korupsi disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat merusak seluruh sistem kehidupan, bahkan sampai kerusakan moral dan mental masyarakat, serta merugikan negara. Faktanya, masih ditemukan penyelewengan kekuasaan oleh pejabat pemerintah dalam bentuk pemberian fasilitas dan perlakuan istimewa terhadap pihak lain yang bertujuan menguntungkan dirinya sendiri. Tindak korupsi yaitu *mark up*, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan *mark down*. Perlu adanya optimalisasi peran Inspektorat Kabupaten/kota sebagai pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan dan menganalisis optimalisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi; (2) untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan-hambatan Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam menjalankan perannya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini didapatkan dua kesimpulan yaitu (1) Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sudah optimal dibuktikan dengan penghargaan untuk pengelolaan gratifikasinya dari hasil pencapaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan sistem akuntabilitas terbaik se-Jawa Tengah. Semakin menurunnya OPD atau ASN bermasalah setiap tahun dan semua OPD atau ASN melaksanakan tupoksinya dengan baik. (2) Penghambat inspektorat Kabupaten Banyumas dalam menjalankan perannya adalah keterbatasan anggaran untuk peningkatan SDM APIP jumlah APIP yang tersedia belum mencukupi dari kebutuhan.

Kata Kunci : Optimalisasi, Penghambat, Inspektorat Kabupaten Banyumas, Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi

SUMMARY

Tiara Dwihanasetya. Master of Law Study Program Concentration of Law and Criminal Justice System Postgraduate Program at Jenderal Soedirman University. Optimizing the Banyumas Regency Inspectorate in Preventing Corruption. Advisory Committee : Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H. M.Hum and Members of Dr. Budiyo, S.H., M. Hum.

The crime of corruption is called an extraordinary crime (extra ordinary crime) which can damage the entire system of life, even to the moral and mental damage of the community, as well as harm the state. In fact, there are still abuses of power by government officials in the form of providing facilities and preferential treatment to other parties aimed at benefiting themselves. Acts of corruption are mark ups, budget abuse, embezzlement, fictitious reports, bribery, fictitious activities/projects, illegal levies, abuse of authority, circumcission/cutting, gratuities, extortion, double budgeting and mark downs. It is necessary to optimize the role of the Regency/Municipal Inspectorate as a supervisor for the implementation of a clean and free regional government from corruption, collusion and nepotism. As regulated by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption; Permendagri No. 23 of 2007 concerning Guidelines for Supervision of Regional Government Administration; Law (UU) Number 23 of 2014 concerning Regional Government.

The aims of this study are (1) to explain and analyze the optimization of the Banyumas Regency Inspectorate in supervising and preventing corruption; (2) to explain and analyze the obstacles of the Banyumas Regency Inspectorate in carrying out its role in supervising and preventing corruption. The use of descriptive qualitative research methods empirical juridical approach in this study obtained two conclusions, namely (1) the role of the Regional Inspectorate of Banyumas Regency in supervising and preventing corruption has been optimally proven by awards for the management of gratuities from the results of achieving local government performance based on the best accountability system in Indonesia.

-Central Java. The decreasing number of problematic OPD or ASN every year and all OPD or ASN carry out their duties and responsibilities well. (2) The obstacle for the Banyumas Regency inspectorate in carrying out its role is the limited budget for increasing APIP HR, the number of APIP available is not sufficient for the needs.

Keywords: Optimization, Inhibitors, Inspectorate of Banyumas Regency, Prevention, Corruption Crimes.